

ABSTRAK

Muh.Takbiratul Ihkram.2022. "Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* Pada Delik *Siri' Na Pacce* Di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa." Skripsi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh Dr. Rahim, M.Hum, S.Hum dan Aulia Andika Rukmana S.Hum, M.Hum). Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui eksistensi sanksi Adat *A'massa* pada delik *Siri' na Pacce* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa. Dan kedua untuk mengetahui kendala sanksi Adat *A'massa* pada delik *Siri' na Pacce* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Gowa, khususnya di Kelurahan Malakaji. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu perwujudan hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. Adapun bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Penerapan sanksi adat *a'massa* jika ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi adat *a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Persamaan dari segi pelaksanaanya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat (*silariang*) yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* memiliki sifat individual-komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyatukan/menyeluruh, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan *residivis*, tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tetapi dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

Kata Kunci: *Sanksi Adat A'massa, Delik Silariang.*